



**LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN MEI TAHUN 2026**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.E.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	9
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	10
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	11
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	13
BAB III PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

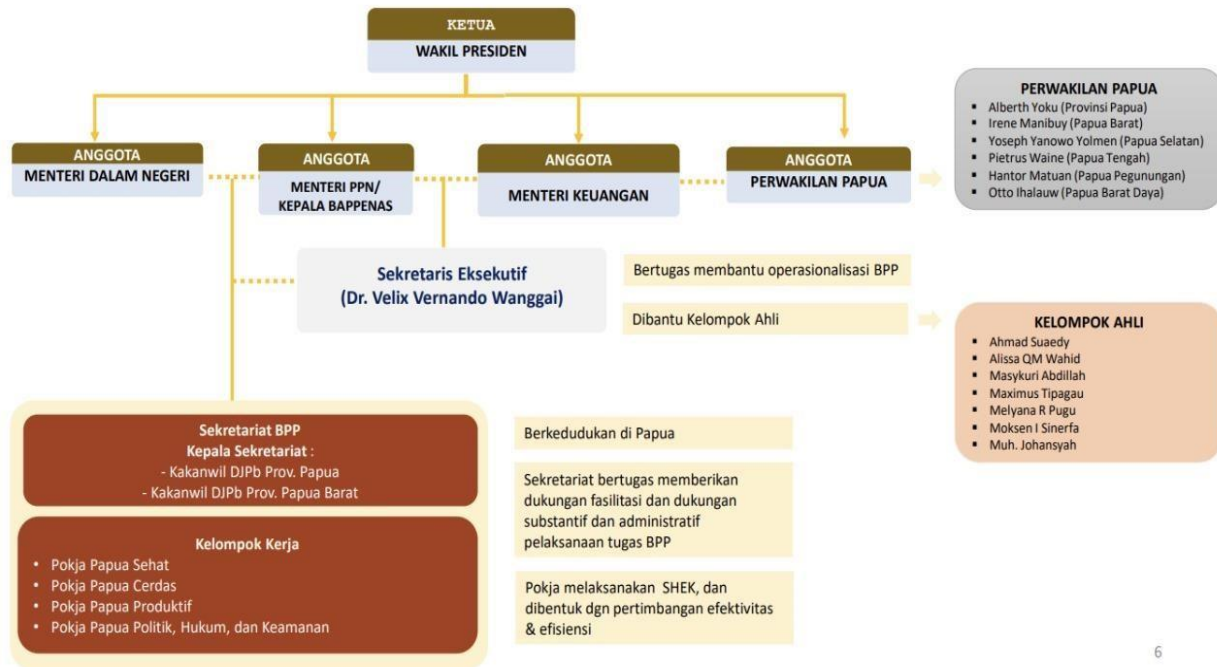
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Mei tahun 2026 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.E.,M.M.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	


2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos., M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL *Pokja Papua Produktif sedang melaksanakan Cuti HJ
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Monitoring Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di SD YPPK Santo Michael Hepuba oleh Pokja Papua Cerdas.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026, bertempat di SD YPPK Santo Michael Hepuba, Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) serta mengidentifikasi upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik di Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Paul Wetipo (Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Pegunungan). • Gaad P. Tabuni (Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan). • Kaleb Asso (Kepala Dinas Pendidikan) Kabupaten Jayawijaya bersama staff. • Enius Lokobal (Kepala SD YPPK Santo Michael Hepuba). • Guru dan peserta didik Program SSH.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	:	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	Dalam kunjungan tersebut, Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Pegunungan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan diikuti oleh 77 siswa dari total 122 siswa sekolah. Program ini dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi, disiplin, dan pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berlangsung secara terstruktur dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Selain pembelajaran akademik, program SSH juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, serta pembelajaran berbasis lingkungan dan budaya lokal. Dalam kesempatan tersebut, Paul Wetipo menyampaikan pentingnya pembentukan karakter dan budaya berkebun sebagai bagian dari proses pendidikan yang dapat menumbuhkan kemandirian serta kecintaan peserta didik terhadap lingkungan. Secara umum, program SSH dinilai sebagai salah satu inovasi pendidikan yang layak


		mendapat dukungan dan pengembangan lebih lanjut di Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di wilayah lain yang memiliki kebutuhan serupa. • Mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. • Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan berbasis karakter dan literasi.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Massal bagi Anggota Jemaat Gereja Effata Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2026, bertempat di Halaman Gereja Effata Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan sosialisasi kesehatan, pemeriksaan kondisi kesehatan anggota jemaat, serta memberikan pelayanan pengobatan massal sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga Kesehatan.
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Puskesmas Wamena Kota yang terdiri dari 2 dokter dan 4 tenaga medis. 2. Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan. 3. Hamba Tuhan dan anggota jemaat Gereja Effata Wamena sebanyak 60 orang.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<p>Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal terlaksana dengan baik atas kerja sama antara Puskesmas Wamena Kota dan Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh sosialisasi mengenai berbagai penyakit yang umum terjadi di masyarakat, seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit jantung, asam urat, diabetes melitus (gula darah), serta pentingnya menjaga pola gizi yang baik. Sosialisasi disampaikan oleh dokter dan tenaga medis dari Puskesmas Wamena Kota.</p> <p>Selain itu, Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan turut menyampaikan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BP3OKP serta memberikan edukasi tentang percepatan upaya kesehatan preventif dan pentingnya kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Sebanyak 60 anggota jemaat mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menerima pelayanan pengobatan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.</p>
Rencana Tindaklanjut	:	1. Merencanakan pelaksanaan pengobatan massal lanjutan dalam kurun waktu tiga bulan mendatang.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong anggota jemaat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di puskesmas terdekat maupun RSUD Wamena. 3. Mendukung masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola konsumsi makanan yang dianjurkan, serta menghindari makanan yang berisiko menimbulkan penyakit.
--	--

Kegiatan 2	
Nama Kegiatan	: Sinkronisasi dan Koordinasi Pokja BP3OKP dalam Kebijakan Percepatan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Pegunungan pada 8 Kabupaten
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026, bertempat di Ruang Kerja Gubernur Lantai III, Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Menyatukan komitmen, arahan, dan strategi percepatan perencanaan serta pelaksanaan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Pegunungan dengan target penyelesaian pada bulan Agustus 2026.
Peserta Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 2. Anggota BPP/Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. 3. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	: <p>Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dilaksanakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan menegaskan mandat kepada Pokja BP3OKP untuk mengawal dan mendampingi tim kerja dalam pelaksanaan pendataan OAP sebagaimana telah dibahas pada Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus pada akhir April 2026.</p> <p>Gubernur juga mengarahkan agar pelaksanaan pendataan dipusatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan instansi terkait di bawah koordinasi</p>

		Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan serta didampingi oleh Pokja BP3OKP. Selain itu, disepakati target penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pendataan pada minggu pertama bulan Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pokja BP3OKP diberikan peran untuk mengarahkan, mengoordinasikan, serta memperkuat kerja sama antarinstansi di tingkat provinsi dan delapan kabupaten guna mempercepat pelaksanaan pendataan OAP secara efektif dan terintegrasi.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan pendataan OAP di tingkat provinsi dan delapan kabupaten. 2. Memastikan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pendataan OAP paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2026. 3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna mencapai target cakupan pendataan OAP secara optimal. 4. Mendukung pelaksanaan pendataan OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penguatan alokasi dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Tinjauan Lapangan Pelaksanaan dan Penerapan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di SD YPPK St. Mikael Hepuba, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026, bertempat di Kompleks SD YPPK St. Mikael Hepuba, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung penerapan sistem dan metode pembelajaran Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), serta

		mengidentifikasi berbagai aspek pendukung pelaksanaan program di lingkungan sekolah.
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. 2. Pengarah BPP dan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Pegunungan. 3. Kepala SD YPPK St. Mikael Hepuba. 4. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. 5. Pokja Papua Sehat dan staf Sekretariat BP3OKP Papua Pegunungan. 6. Guru-guru SD YPPK St. Mikael Hepuba. 7. Peserta didik SD YPPK St. Mikael Hepuba.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<p>Kegiatan tinjauan lapangan terlaksana dengan baik dan memberikan gambaran langsung mengenai penerapan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di SD YPPK St. Mikael Hepuba. Tim memperoleh penjelasan dari kepala sekolah dan para guru terkait pelaksanaan program, metode pembelajaran yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.</p> <p>Selama kunjungan, peserta berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa melalui kegiatan menyanyi, berdoa, wawancara, dan penyampaian pengalaman belajar yang dirasakan oleh peserta didik. Pokja Papua Sehat turut memberikan perhatian terhadap penerapan pola makanan bergizi bagi siswa sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan dan kualitas pembelajaran.</p> <p>Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap ruang kelas, dapur sekolah, fasilitas kamar mandi, sumber air bersih, serta kondisi sanitasi lingkungan sekolah guna melihat kesiapan sarana pendukung pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH).</p>
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah terkait penguatan dan pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). 2. Mendukung perbaikan dan penguatan dapur gizi sekolah untuk menunjang penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik.

		3. Meningkatkan pengelolaan sanitasi dan kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Lanjutan Penanganan Kondisi Kesehatan Anggota BPP BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan atas nama Bapak Hantor Matuan, S.IP.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal, 11 Mei 2026, bertempat di Ruang ICU RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan koordinasi dan pendampingan penanganan kondisi kesehatan Bapak Hantor Matuan, S.IP. yang berada dalam kondisi kritis di Ruang ICU RSUD Wamena, termasuk upaya persiapan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap sesuai persetujuan keluarga.
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. dr. Anto (Dokter Spesialis Penyakit Dalam). 2. dr. Muchlien (Dokter Penanggung Jawab Ruang ICU). 3. dr. Maria Rumeteray. 4. dr. Charles (RSUD Wamena). 5. Gaad P. Tabuni (Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan). 6. Keluarga Bapak Hantor Matuan. 7. Gembala Gereja. 8. Dokter dan tenaga perawat Ruang ICU RSUD Wamena.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan melakukan koordinasi dengan Direktur RSUD Wamena yang selanjutnya mengarahkan komunikasi dengan dokter

	<p>spesialis penyakit dalam dan dokter penanggung jawab Ruang ICU. Berdasarkan penjelasan tim medis, kondisi kesehatan Bapak Hantor Matuan tergolong sangat serius dengan gangguan pada jantung, ginjal, dan paru-paru yang disertai komplikasi lainnya. Tim medis juga menjelaskan bahwa pemeriksaan lanjutan pada bagian otak belum dapat dilakukan karena keterbatasan alat yang sedang mengalami kerusakan.</p> <p>Hasil koordinasi dengan dokter yang menangani menyatakan bahwa kondisi pasien terus mengalami penurunan dan membutuhkan penanganan intensif. Selama beberapa hari terakhir pasien mengalami keluhan nyeri berat pada bagian kepala yang berlangsung secara terus-menerus.</p> <p>Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan istri dan keluarga pasien yang menyampaikan harapan agar Bapak Hantor Matuan dapat dirujuk ke RSUD Dok II Jayapura untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pihak dokter menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan surat rujukan serta melakukan komunikasi dengan rumah sakit tujuan di Jayapura. Koordinasi juga dilakukan dengan Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan terkait dukungan pembiayaan transportasi rujukan, yang pada prinsipnya mendapat respons positif untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Namun sebelum proses rujukan dapat dilaksanakan, pada pukul 23.30 WIT Bapak Hantor Matuan, S.IP. dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena.</p>
Rencana Tindaklanjut	: Menindaklanjuti meninggalnya Bapak Hantor Matuan, S.IP., keluarga bersama BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan melakukan koordinasi terkait persiapan rumah duka, pelaksanaan ibadah penghiburan, prosesi pemakaman, serta dukungan yang diperlukan sesuai keputusan dan kesepakatan keluarga.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Partisipasi BP3OKP dalam Rangkaian Duka dan Pemakaman Almarhum Bapak Hantor Matuan, S.IP., Anggota BPP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal, 12–14 Mei 2026, bertempat di Kantor BP3OKP Papua Pegunungan dan Rumah Duka Keluarga di Napua, Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi, pendampingan, serta partisipasi dalam rangkaian kegiatan duka cita dan pemakaman Almarhum Bapak Hantor Matuan, S.IP. melalui kolaborasi antara Sekretariat BPP Provinsi Papua, KPPN Wamena, BP3OKP Papua Pegunungan, dan keluarga besar almarhum.
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris BPP Provinsi Papua. 2. Kepala KPPN Wamena. 3. Anggota dan Pokja BP3OKP Papua Pegunungan. 4. Staf Sekretariat BPP Provinsi Papua. 5. Staf KPPN Wamena. 6. Staf pendukung BP3OKP Papua Pegunungan. 7. Keluarga besar Almarhum Bapak Hantor Matuan, S.IP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Rangkaian duka dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Almarhum Bapak Hantor Matuan, S.IP. serta sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas keluarga besar BP3OKP, Sekretariat BPP, dan KPPN Wamena.

	<p>Pada tanggal 12 Mei 2026, dilakukan pengantaran jenazah dari RSUD Wamena menuju rumah duka di Napua serta koordinasi dan keterlibatan bersama keluarga dalam pelaksanaan kegiatan duka.</p> <p>Pada tanggal 13 Mei 2026, BP3OKP bersama Kepala KPPN Wamena menjemput Kepala dan Tim Sekretariat BPP Provinsi Papua beserta staf di Bandara Wamena untuk melaksanakan kunjungan duka. Pada hari yang sama, Koordinator Pengarah BPP Provinsi Papua, Pdt. Albert Yoku, bersama Pengarah BPP Provinsi Papua Tengah, Irjen Pol. Petrus Wayne, tiba di Wamena dan turut melayat ke rumah duka di Napua. Dalam kunjungan tersebut disampaikan dukungan moril kepada keluarga serta bantuan bahan makanan sebagai bentuk kepedulian dan belasungkawa hingga pelaksanaan pemakaman.</p> <p>Pada tanggal 14 Mei 2026, dilakukan pengantaran Sekretaris BPP Provinsi Papua beserta staf menuju Bandara Wamena untuk kembali ke Jayapura. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan antara Sekretariat BPP, KPPN Wamena, BP3OKP Papua Pegunungan, serta keluarga almarhum dalam menghadapi suasana duka atas berpulangnya salah satu Anggota BPP Provinsi Papua Pegunungan.</p>
<p>Rencana Tindaklanjut</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti proses keberlanjutan kepemimpinan dan keanggotaan BPP sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku melalui Sekretariat BPP Provinsi Papua. 2. Menjaga soliditas, koordinasi, dan kekompakan kerja di lingkungan Pokja BP3OKP Papua Pegunungan sambil menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pimpinan.
<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p> 



Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) HIPMI Provinsi Papua Pegunungan Berbasis Kemitraan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026, bertempat di ruang Rapat Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka percepatan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar strategis pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan Pimpinan HIPMI Pusat. 2. Staf Ahli Bidang Perekonomian mewakili Gubernur Papua Pegunungan. 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Pegunungan. 4. Perwakilan BP3OKP Papua Pegunungan (Pokja Papua Sehat) 5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan. 6. Pelaku usaha dan dunia bisnis. 7. Pimpinan enam lembaga perbankan di Kota Wamena. 8. Pengurus HIPMI Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) HIPMI Provinsi Papua Pegunungan terlaksana dengan baik sebagai wadah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kegiatan

		<p>ini disampaikan sosialisasi mengenai eksistensi kepengurusan serta visi dan misi HIPMI Provinsi Papua Pegunungan beserta kepengurusan cabang pada delapan kabupaten.</p> <p>Sebelum pelaksanaan FORBISDA, HIPMI Papua Pegunungan telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan kegiatan pendidikan serta pelatihan organisasi selama tiga hari. Forum juga menampilkan enam stand pameran produk UMKM Orang Asli Papua (OAP) sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha lokal dan promosi produk unggulan daerah.</p> <p>Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah terbangunnya komitmen kerja sama antara HIPMI Papua Pegunungan dengan enam lembaga perbankan di Wamena yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Papua Pegunungan.</p>
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembinaan dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten di Papua Pegunungan. 2. Memperkuat kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Meningkatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 7	
Nama Kegiatan	: Koordinasi Lanjutan Percepatan Perencanaan Master Plan dan Kajian AMDAL Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal, 21 Mei 2026, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap percepatan finalisasi dokumen Master Plan dan Kajian AMDAL sebagai persyaratan dasar pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Pegunungan. 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. 3. Kepala Subbidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: Papua Sehat
Hasil Kegiatan	: Kegiatan koordinasi dilaksanakan untuk mengevaluasi progres penyusunan Master Plan dan Kajian AMDAL pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa penyusunan kedua dokumen tersebut masih mengalami keterlambatan karena terdapat beberapa komponen yang belum lengkap dan perlu

		<p>segera disempurnakan agar dapat memenuhi persyaratan perencanaan pembangunan.</p> <p>Selain itu, diperoleh informasi bahwa penyusunan Master Plan dan Kajian AMDAL sebelumnya dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan terdahulu tanpa melibatkan secara optimal unsur internal Dinas Kesehatan, khususnya Sekretaris Dinas dan Subbidang Perencanaan. Koordinasi juga belum melibatkan secara penuh instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan. Oleh karena itu, disepakati perlunya peninjauan dan penyempurnaan kembali dokumen dengan melibatkan seluruh pihak yang berkompeten.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa percepatan penyelesaian Master Plan dan Kajian AMDAL memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar seluruh tahapan penyusunan dapat diselesaikan dan dieksekusi pada Tahun Anggaran 2026. Untuk itu diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan guna mempercepat penyediaan dokumen perencanaan sebagai dasar pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan.</p>
<p>Rencana Tindaklanjut</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penyelesaian Master Plan dan Kajian AMDAL dengan seluruh instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup. 2. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai hasil evaluasi dan masukan dari instansi teknis terkait. 3. Mendorong dukungan pendanaan yang memadai guna mempercepat penyelesaian Master Plan dan Kajian AMDAL pada Tahun Anggaran 2026. 4. Melakukan monitoring dan koordinasi secara berkala untuk memastikan percepatan pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan.

Dokumentasi
Kegiatan

:



BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Juni 2026
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**